

**KOMUNIKASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT  
BERBASIS DIALEK BUDAYA LOKAL  
(Studi Kasus Proses Komunikasi Penunjang Pembangunan Berbasis Dialek Konjo  
pada Masyarakat di Tana Toa Kajang Kabupaten Bulukumba)**

**COMMUNICATION BETWEEN GOVERNMENT AND COMMUNITY  
BASE ON DIALECT of LOCAL CULTURE  
(Case Study On the proces of development communication Process By Konjo Dialect  
in Tana Toa Kajang Community in Kabupaten Bulukumba)**

**Syarifuddin**

Peneliti pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi  
dan Informatika Makassar Jl. Prof. Abdurrahman Basalama II No. 25 Makassar  
Telp./Fax.+62411-4660084 [syarif\\_akbar@ymail.com](mailto:syarif_akbar@ymail.com).

(Naskah diterima melalui email pada 13 Agustus 2014, diperiksa mitra bestari September 2014,  
direvisi Oktober 2014, Disetujui Terbit November 2014 )

**ABSTRACT**

*This study deals with the phenomenon of communication process between the Government and the community using Konjo dialect (local dialect). Research also wants to get an overview about othat communication process through that language. By using qualitative research approach and methods of case study introduced by Yin, this reseacch shows that Konjo dialect is a form of verbal communication process without media in interpersonal and small group-communication settings. The participants who use Konjo dialect are local peoples, communities in Tana Toa Kajang Bulukumba. The communication process is bound with communication message called Pasang ri Kajang which mean "Message, mandate; advice, mandate ; forecast ; and Warning/recall". The development agent's success in the communication process with Konjo dialect because they refer to the Development Support Communication principle. The agent has the support from the Liaison. Effects is still cognition. Conative effect is achieved because of life principle of Pasang ri Kajang that is "kamase-masea" which mean humbleness in life. In order to achieve the conative effect, it requires the spread of need for achievement virus by liaison in Kajang tribal communities.*

**Keywords : Communication; Development Support Communication; local culture,Konjo Dialect.**

**ABSTRAK**

Penelitian ini ingin mengetahui fenomena proses komunikasi yang terjadi antara Pemerintah dan Masyarakat yang *setting*-nya berbasiskan pada *dialek konjo*. Penelitian ingin mendapatkan gambaran proses komunikasi melalui *dialek konjo*. Dengan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus model Yin, penelitian menunjukkan, *dialek Konjo* merupakan bentuk proses komunikasi lisan non media yang keberlangsungannya bisa dalam *setting* interpersonal maupun kelompok. Partisipan komunikasi berbasis *dialek Konjo* dalam realitasnya bersifat lokal (khusus), dilakukan komunitas suku Kajang di di Tana Toa Kajang Kabupaten Bulukumba saja. Proses komunikasi tersebut terikat dengan pesan komunikasi yang disebut *Pasang ri Kajang*. Makna isi dari *Pasang ri Kajang* itu yaitu "Pesan, wasiat, amanat; Nasihat atau wasiat; Amanat/amanah; Renungan/ramalan; dan Peringatan/mengingat". Keberhasilan agen pembangunan menerapkan Proses komunikasi yang berbasis dialek Konjo, berdasarkan indikasinya karena berbasiskan pada prinsip Komunikasi Penunjang pembangunan (*Development Support Communication-DSC*). Para agen ini mendapat dukungan dari *Liaison*. Efek yang dicapai baru efek kognitif. Efek konatif tercapai berindikasi karena masyarakat Kajang masih terikat *Pasang ri Kajang* yang nota bene ditunjang prinsip hidup masyarakat yang disebut "kamase-masea" yang bermakna *kehidupan yang serba sangat sederhana*. Dalam kasus ini, untuk dapat mencapai efek konatif, maka sebagai prakondisi, diperlukan langkah awal berupa penyebaran virus *need for achievement* oleh *liaison* di kalangan komunitas suku Kajang.

**Kata-kata Kunci : Komunikasi; Komunikasi Penunjang Pembangunan; Budaya Lokal. Dialek Konjo**

## PENDAHULUAN

Konsultasi publik dan komunikasi publik antara pemerintah dan masyarakat menjadi sesuatu yang penting dan tujuannya seperti yang dinyatakan dalam UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik antara lain adalah untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Selain itu adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Dengan cara ini segala masalah yang dihadapi bangsa ini satu persatu dapat diselesaikan.

Di sisi lain, proses dimaksud itu sendiri secara esensial sebenarnya mengandung makna pembangunan, yakni pembangunan yang melalui proses komunikasi melibatkan aparatur pemerintah dan masyarakat. Pembangunan sendiri berarti sebuah proses perubahan sosial yang dirancang untuk kepentingan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan, sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan (Rogers, 1985, dalam Rusadi, 2014), pembangunan tidak sekedar pembangunan fisik tetapi juga mencakup perubahan sosial dan lingkungan (Budiman, 1995).

Terkait dengan proses komunikasi pembangunan sendiri, itu sebenarnya bermula dari konsep modernisasi. Merujuk pada pandangan filosofis proses modernisasi, pembangunan diartikan sebagai proses rasionalisasi pola pikir masyarakat yang terikat pada nilai-nilai yang banyak dianut oleh Negara-negara berkembang, seperti menggunakan cara-cara tradisional dalam memecahkan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat (Rusadi, 2014). Dalam kaitan ini, maka Rogers (1976, 50-51) meninjau model pembangunan modernisasi yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi, teknologi padat modal, perencanaan terpusat dan menganggap bahwa penyebab keterbelakangan berasal dari faktor intern negara berkembang dianggap sebagai paradigma dominan dan telah berakhir. Lalu berkembang paradigma alternatif. Paradigma alternatif tidak lagi mengandalkan pada pertumbuhan ekonomi tetapi pada keseimbangan atau kesetaraan distribusi, kualitas hidup, proses pembangunan menekankan pada integrasi cara tradisional dan modern serta menekankan pada teknologi yang padat karya (Rusadi, 2014).

Pada paradigma alternatif ini, perencanaan lebih mengandalkan pada pengembangan diri melalui proses desentralisasi dan partisipasi masyarakat, sebagai penyebab suatu negara menjadi tidak berkembang tidak semata-mata disebabkan oleh faktor dari internal tetapi juga faktor eksternal. Dengan pandangan ini, maka proses pembangunan dimulai dari system internal masyarakatnya, dengan cara proses pemberdayaan potensi-potensi yang ada dan ide pembangunan harus bersumber dari kebutuhan nyata masyarakatnya. (Rusadi, 2014)

Tahun 1987 atau setelah 10 tahun Rogers melakukan tinjauan dan mengkritik model pembangunan yang bertumpu pada konsep modernisasi, Jayaweera menulis artikel dan memikirkan kembali terhadap model komunikasi Pembangunan. Jayaweera melihat perkembangan teknologi komunikasi dan potensinya sebagai pendukung percepatan pembangunan. Jayaweera lalu membedakan konsep komunikasi pembangunan (*Development Communications-DC*) dengan Komunikasi Penunjang pembangunan (*Development Support Communication-DSC*). Dalam model DC pendekatan yang dilakukan merupakan model makro, merupakan proyek nasional yang diterapkan ke seluruh anggota masyarakat, sedangkan DSC pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan mikro yang berusaha menyelesaikan permasalahan masyarakat pada tingkatan komunitas sesuai dengan aspirasi komunitasnya. (Rusadi, 2014)

Melalui rujukan model DSC sebelumnya, penelitian ini mencoba menelaah fenomena konsultasi publik dan komunikasi publik antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai sebuah kasus, penelitian ini mengarahkannya pada fenomena cara berkomunikasi masyarakat di Tana Toa Kajang Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Cara ini sendiri lazim dikenal dengan istilah *dialek konjo*. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, penelitian ini ingin mengetahui fenomena proses komunikasi yang terjadi antara Pemerintah dan Masyarakat yang *setting*-nya berbasiskan pada *dialek konjo* sebagai bentuk representasi dari budaya lokal. Dengan fokus persoalan tersebut, penelitian ini ingin mendapatkan gambaran proses komunikasi menyangkut unsur *what, how and why* melalui *dialek konjo*. Dengan pengetahuan mengenai gambaran dimaksud, tentunya penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena secara akademis setidaknya dapat semakin memperkaya literatur yang sudah ada menyangkut riset-riset komunikasi tentang komunitas di Indonesia. Sementara secara praktis,

temuan penelitian ini setidaknya dapat menjadi pemandu awal bagi akademisi yang tertarik mempelajari suku di Tana Toa Kajang Kabupaten Bulukumba

**Tinjauan literatur**

Studi mengenai Konjo khususnya dan masyarakat pada umumnya, dari hasil tinjauan literatur tampak bahwa masih relatif minim yang melakukannya. Perhatian pihak-pihak itu pun terlihat belum ada yang melakukannya hingga ke tahap riset, terutama lagi riset yang berhubungan dengan riset komunikasi baik melalui pendekatan kuantitatif maupun melalui pendekatan kualitatif.

Perhatian akademisi tertinggi dalam memahami Konjo atau masyarakat Kajang pada umumnya, terlihat baru sebatas wacana. Wacana ini paling tinggi disampaikan dalam bentuk buku dan bahkan ada yang mewacanakannya hanya pada tingkat blog saja.

Akademisi yang pewartannya hingga tingkat buku diantaranya yang berhasil ditemukan dalam tinjauan literatur yaitu Alim Katu, Mas, pewartaan disajikan melalui buku Manusia kajang, 2005, Pustaka Refleksi, Makassar. Kemudian Herawati, dituangkannya dalam buku Pemertahanan Bahasa Konjo di Tengah Desakan Bahasa Bugis Di Buffer Stard, Balai Bahasa Prov. Sulteng, 2010. Sementara yang dituangkan dalam blog yaitu disampaikan oleh Amran Jabal, Mengenal Konjo Pesisir, 2009, Blogspot.com dan Fendy E.W.Farengkuan, Pesan Kultural dari Makassar, 2012.

Dari hasil tinjauan literatur itu, kiranya jelas bahwa *state of the arts* menyangkut Konjo atau masyarakat Kajang pada umumnya, masih relatif minim dan terkait dengan riset bahkan mungkin belum ada. Studi Kasus Proses Komunikasi Pembangunan Berbasis Dialek Konjo pada Masyarakat di Tana Toa Kajang Kabupaten Bulukumba, karena itu menjadi sangat penting untuk dilaksanakan.

Dalam riset ini, konsep-konsep yang relevan dalam pemanfaatannya, kemungkinan besar akan terkait dengan konsep teritik seperti Komunikasi Pembangunan, Komunikasi Pendukung Pembangunan, Budaya Lokal. Meskipun demikian, tetap akan terbuka bagi penggunaan konsep lainnya dan ini tentu tergantung pada temuan data lapangan.

**Methodologi**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ammatoa Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif guna menjawab fokus permasalahannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode *case study* versi Robert K Yin. Robert K Yin mengatakan studi kasus sebagai sebuah riset yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*. (Yin 1997, 1).

Dalam studi kasus yang dilakukan akan diterapkan beberapa cara pengumpulan data seperti ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

No.	Teknik Pengumpulan Data	Unit Analisa	Output
1	indepth interview	Aparat pemerintah yang relevan dengan masalah penelitian dari tingkat kecamatan, pedesaan, pedusunan, dan penyuluh, anggota masyarakat Ammatoa, dan pemangku adat.	verbatim/ transkrip wawancara
2	observasi	Proses komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Kajang Ammatoa.	verbatim hasil observasi
3	studi dokumen	Dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa literatur, laporan tahunan, majalah, jurnal, tabel, karya tulisan ilmiah dokumen peraturan pemerintah dan undang-undang yang telah tersedia pada lembaga yang terkait	hasil studi dokumen dan foto-foto

No.	Teknik Pengumpulan Data	Unit Analisa	Output
4.	catatan harian	Bagaimana pandangan peneliti dalam keseharian masa kerja pengumpulan data di lapangan	transkrip catatan harian

## PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian :

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Tana Toa Kajang Bulukumba Sebagai Wilayah Adat (tempat eksisnya dialek konjo)

Secara administratif Desa Tana Toa berada dalam wilayah Kecamatan Kajang, salah satu kecamatan dari sembilan kecamatan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Kecamatan kajang memiliki luas Wilayah 126.18 km, terpilah ke dalam 1 kelurahan, 4 desa, dan 4 desa persiapan. Empat desa persiapan (Bonto Biraeng, Lembang, Batunilamung, dan Mattoaning), karena pertimbangan luas wilayah dan upaya pemerintah daerah meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya secara meluas di Kecamatan Kajang, merupakan pemekaran dari ke-4 desa lama yaitu, Lembanna, Tambangan, Tana Toa, dan Possi tana. Kelurahan tana Jaya, satu-satunya kelurahan di Kecamatan Kajang menjadi ibu kota kecamatan.

Kecamatan Kajang disebut Bulukumba Timur oleh masyarakat Kajang dan Herlang (kecamatan yang bertetangga dengan kecamatan Kajang lantaran letaknya berada di ujung sebelah timur Kabupaten Bulukumba, dengan batas wilayah : 1) Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Hutan Tombolo, kabupate Sinjai.; 2) Di sebelah Timur dibatasi oleh Teluk Bone.; 3) Di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bulukumpa; 4) Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Herlang (Hero Lange-lange).

Secara umum dapat disebutkan bahwa keadaan alam Kecamatan Kajang terdiri atas daratan berbukit dan lembah-lembah yang subur untuk pertanian dan perkebunan, disamping kawasan hutan dengan hasil kayu, rotan, dan buah-buahan.

Penduduk yang berdiam di pesisir paling timur, yakni di sekitar perairan Teluk Bone, mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan baik sebagai pekerjaan pokok maupun sambilan. Hasil dari lut tersebut dipasarkan di luar kecamatan dan sebagian dijual di Kajang sendiri.

Di kelurahan Tana jaya terdapat sebuah pelabuhan, yaitu pelabuhan Kassi (pada masa pra-kemerdekaan, pelabuhan ini memainkan peran penting di Bulukumba, khususnya "Bulukumba Timur", sebagai sarana transportasi laut untuk mengapalkan hasil-hasil bumi dari wilayah ini. Setelah kemerdekaan, pelabuhan ini kurang berfungsi hingga sekaang yang dimanfaatkan oleh penduduk untuk jual-beli hasil laut.

Desa Tana Toa adalah desa dengan wilayah paling luas di Kecamatan kajang. Pada tahun 1984 – 1987 luas wilayahnya 37.50 km, dan sesudah pemekaran desa tahun 1987 menjadi 19.50 km sebahagian besar wilayahnya terdiri atas kawasan hutan adat, ladang (800.50 ha) dan sawah (200 ha) dengan variasi ketinggian antara 150 – 500 M di atas permukaan laut.

Desa Tana Toa berbatasan dengan Kabupaten Sinjai di sebelah Utara, dengan Desa Tambangan di sebelah Selatan, dengan Desa Possi Tanah dan Desa Lembanna di sebelah Timur, dan Kecamatan Bulukumpa di sebelah Barat.

Karena berada dalam radius ketinggian antara 150 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut, menyebabkan udara sejuk. Dengan temperatur suhu udara semacam ini berbagai macam tanaman pertanian dan perkebunan dapat tumbuh serta hutan yang subur dan lebat yang menghasilkan berbagai jenis kayu lainnya. Desa Tana Toa yang terdiri tujuh dusun diantaranya lima merupakan kawasan adat. Ketujuh dusun tersebut masing-masing dihubungkan oleh jalan desa yang dibangun oleh swadaya masyarakat setempat sepanjang kurang lebih 20 km. Sebahagian besar masih berupa jalan tanah. Kondisi jalan sangat buruk pada waktu musim hujan. Disamping jalan desa, terdapat pula jalan daerah yang dibangun oleh pemerintah kurang lebih 5 km dengan kondisi jalan yang lumayan.

Kurangnya sarana dan prasarana transportasi menjadikan desa Tana Toa menghadapi sejumlah kendala dalam proses pembangunannya, di samping hambatan "cultural".

Sama halnya dengan kebanyakan keadaan daerah di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan yang bercorak agraris. Kegiatan-kegiatan perekonomian di desa ini didominasi oleh sektor pertanian.

Bertani, berkebun atau pekerjaan agraris lainnya adalah sektor pekerjaan yang ditekuni mayoritas masyarakat di desa Tana Toa, disamping berburu dan meramu hasil hutan. Jenis pekerjaan yang disebutkan terakhir, pada waktu sekarang ini bukanlah merupakan mata pencaharian utama. Hanya dikerjakan pada waktu-waktu tertentu.

Meskipun pada papan potensi desa Tana Toa memperlihatkan angka-angka bahwa separuh dari jenis tanahnya terdiri dari batuan dan berlumpur, akan tetapi secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa daerah ini cukup subur. Sawah terutama ladang-ladang dan hutannya yang lebat terlihat mendominasi topografi desa Tana Toa. Dengan padang rumput yang juga banyak terdapat di wilayah ini sangat menunjang perkembangan usaha peternakan.

Struktur penduduk di desa ini didominasi oleh penduduk yang berada pada kelompok usia muda dan produktif. Keadaan demikian ini memberikan kemungkinan perspektif sosial yang berlainan di masa yang akan datang terutama yang diakibatkan oleh sektor pendidikan, dan memungkinkan penggarapan potensi alam desa Tana Toa yang memiliki areal sawah sebanyak 4898 hektar dan 4924 hektar ladang/kebun, 3.75 hektar emang serta kawasan hutan seluas 1899 hektar.

Program wajib belajar juga tengah dilaksanakan di Desa Tana Toa, termasuk anak usia sekolah yang berdiam di dalam wilayah adat. Pengenalan pendidikan bagi kalangan komunitas Ammatoa untuk masa sekarang ini dilakukan secara bukan formal dan melalui pendekatan persuasif.

Berbeda dengan anak usia sekolah yang mukim *ri pantarang embayya* yang telah memanfaatkan fasilitas sekolah formal, maka terhadap mereka yang berada di dalam *rambang seppangna I amma*, pemerintah setempat baru pada tahap program Buta Aksara. Menyadari kenyataan ini, pemerintah setempat cq. Diknas mengusahakan pendidikan dengan model khusus yang disesuaikan dengan keberadaan mereka dan ternyata usaha ini cukup membawa hasil.

Karena sangat minimnya tingkat pendidikan dan ketatnya tradisi pasang yang menyebabkan penduduk tidak punya banyak pilihan atas pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan ijazah. Kecuali bagi masyarakat tau kuasanya.

Bagi komunitas Ammatoa, menjadi petani, peladang, atau pada musim tertentu meramu hasil hutan dan berburu serta menyadap nira merupakan pekerjaan mencari nafkah. Bagi kaum wanita ialah menenun dan membantu di sawah atau ladang.

Hampir semua kaum wanita pandai menenun *tope* (sarung) dan daster. Mereka membeli ganti (benang) sebagai bahan dasar di pasar Kalimporo dan proses pewarnaannya (hanya warna hitam) dikerjakan sendiri dengan mencampurkan sejenis pohon yang disebut tarung pada benang. Setelah beberapa waktu direndam, benang akan berubah warna. Sebagian hasil tenun dipergunakan untuk keperluan sendiri dan sebagian lagi dijual.

Pilihan-pilihan atas jenis pekerjaan yang terbatas ini bagi kalangan komunitas Ammatoa, seperti telah disebutkan, disebabkan oleh sistem nilai (pasang *ri Kajang*) yang sangat selektif terhadap semua hal-hal yang baru. Sehingga mata pencaharian mereka terbatas pada bentuk pekerjaan yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Dan walaupun ada perubahan terhadap pola tersebut, terbatas pada perdagangan hasil kerajinan tangan (tenun) yang dijual di pasar sekitar Kalimporo (kira-kira 5 kilometer dari daerah mukim komunitas) dan hasil dari penjualan tersebut dipergunakan untuk membeli keperluan rumah tangga, misalnya garam, gula, atau alat-alat pertanian yang tidak bisa mereka buat.

## 2. Potret Masyarakat Konjo di Tana Toa Kajang Kabupaten Bulukumba

Sebagian besar orang Konjo hidup di sisi pegunungan yang tidak begitu cocok untuk pertanian padi, meski sebagian teras sawah mengesankan di buat juga orang konjo pegunungan di sekitar Malino, kawasan pegunungan Kabupaten Gowa. Makassar – Konjo sekitar 75 persen kosakata dasar dengan bahasa Makassar standar. Dialek konjo sendiri terbagi ke dalam dua sub kelompok : “Konjo pegunungan”, dengan jumlah penutur sekitar 100.000 di gunakan di dan sekitar Gunung Bawakaraeng, dan “konjo pesisir” juga dengan penutur sebanyak sekitar 100.000 jiwa, di pakai di pantai teluk Bone.

Konjo pesisir dan pegunungan berhubungan dengan level kesamaan leksikostatistik sebesar 75 persen, sehingga keduanya tidak lebih dekat dari masing-masing ketimbang dengan Makassar standar. Akan tetapi pada level morfonemik, morfologi, dan sintaksis keduanya hampir-hampir sama. Menurut Gibson (2009), Konjo pegunungan telah mencapai subjek sejumlah penelitian yang terpublikasi, masing-masing oleh Rossler (1987, 1990, 2000) dan Rottger-Rossler (1989, 2000). Konjo di kecamatan-kecamatan timur Kabupaten Bulukumba di kelompokkan dalam “Konjo Pesisir”.

Konsep kecamatan pertama dan kabupaten berasal dari bahasa Jawa. Keduanya menggantikan istilah pemilihan Belanda, regenensi dan distrik, pada Tahun 1960-an sebagai sistem administratif yang terseragamkan di seluruh Indonesia. Sebagian dari unit-unit sesuai dengan kerajaan-kerajaan lama, sebagian lainnya merepresentasikan penggabungan atau pemilahan dari unit-unit kerajaan lama itu. Kecamatan di pesisir Bulukumba meliputi kecamatan Kajang, Hero Lange-lange (Herlang), Bonto Tiro, dan Bontobahari. Ibu kota Bulukumba dan sekitarnya dihuni populasi berbahasa Bugis yang besar sejak abad ke-17, ketika kawasan ini berada di bawah kendali VOC, yang menyerahkan ke kerajaan Bone. Para penutur konjo menyimpan sebetuk perasaan satu identitas etnolinguistik khususnya dalam konteks lokal di kabupaten, di mana mereka selalu membentuk satu faksi yang bereposisi dengan penutur Bugis. Dalam konteks ini mereka menunjukkan diri mereka dalam bahasa Indonesia sebagai “orang di atas”, (Frase ini juga mengandung konotasi dalam bahasa Indonesia sebagai “kelas atas”).

Secara historis kerajaan konjo pesisir paling utara adalah Kajang. Di jantung Kajang terdapat sebuah desa yang di sebut Tana Toa,” negeri tua “, terkenal sebagai sebuah tempat bercokolnya kekuatan mistik yang kuat. Desa ini di pimpin oleh “Amma Toa” “ayah tua” . Tokoh ini di kelilingi banyak kisah mistik, yang dipercaya sebagai reinkarnasi ‘Amma Toa’ sebelumnya.

Kandidat yang berhasil menggantikan “Amma Toa” sebelumnya dipilih lewat proses panjang dan rumit. Serangkaian pertanda (seekor kerbau, ayam jantan, dan asap dupa) seluruhnya harus menunjuk pada kandidat yang sama, yang kemudian harus mampu menuturkan serangkaian mitos dan silsilah tanpa cacat dan tanpa perlu mempelajarinya. Di selatan Kajang, Kerajaan kuno Hero dan Lange-lange telah disatukan dalam satu kecamatan Herlang. Keduanya dalam banyak hal masih berada di bawah pengaruh kerajaan kajang yang jauh lebih besar, dan serta turut dalam pemujaan yang dipimpin oleh AmmaToa (Usop 1985).

Di selatan Hero dan Lange-lange terdapat kerajaan Tiro, Batang dan Bonto Tangnga yang merupakan kerajaan kuno pedalaman. Seluruhnya di gabungan dalam kecamatan Bonto tiro pada tahun 1960-an. Secara tradisional kerajaan tadi bergabung pada pertanian khususnya jagung. Kerajaan Tiro jauh lebih besar di banding kedua tetangganya, dan terdiri dari tujuh bagian. Masing-masing bagian di pimpin oleh seorang pejabat dan gelar berbeda, merunut hierarkinya adalah sebagai berikut : Lompo, ’sang agung’Erelebu, Gallarang yang bergelar Kalumpang; anrong tau,ibu rakyat, Caramming; kapala’kepala’ Hila-hila; Macoa “yang lebih tua” diperbatasan selatan kalumpang, dan di tenggara Caramming, jadi ikatan terdekat Ara dengan Tiro adalah dua pemukiman ini. Di selatan Bonto Tiro terdapat kecamatan Bontobahari, ”negeri laut“. Sebab tanah di Bontobahari sangat tipis untuk mendukung kegiatan pertanian, desa-desa di Bonto Tiro secara tradisional menjadi penyuplai sebagian besar makanan yang di konsumsi Bonto Bahari untuk di pertukarkan dengan ikan, uang atau barang-barang dagangan. Spesialisasi pada pertanian ini terus terbawah bahkan oleh pekerja Bonto Tiro di rantau, yang direktur untuk menjadi pekerja perkebunan di Sumatera ketimbang di tempat-tempat pembuatan perahu.

Bontobahari terdiri dari kerajaan lama Ara, Bira, Lemo-Lemo dan Tanahberu. Dekatnya ikatan kekerabatan dan pertukaran ekonomi mengaitkan empat wilayah kuno ini. Seluruhnya sangat bergantung pada laut mata pencaharian; Ara dan Lemo-Lemo mengandalkan nyaris hanya pada pembuatan perahu, sementara Bira dan Tanaberu pada perdagangan dan penangkapan ikan jarak jauh, dan kaum perempuan Bira juga memproduksi tekstil katun berkualitas tinggi. Pembagian pekerjaan di empat desa ini sangat sistematis sehingga kaum pria di Ara menyangkal bila di katakan tahu melayarkan, atau bahkan membuat simpul layar, salah satu perahu yang dia buat sendiri. Para pria Bira dapat menggantikan kemudi, tiang, dan layar

sebuah perahu, tetapi tidak dapat membuat lambungnya. Karena mereka adalah pelaut, para pelaut Bira lebih di kenal di seberang dan Bira biasa didefenisikan dalam literatur sebagai kampungnya para pembuat perahu.

Hingga tahun 1930-an, para pria Ara bergantung nyaris hanya para orang Bira untuk membuat perahu. Mereka di bayar dengan uang, yang dapat diperoleh orang Bira dari aktifitas perdagangan jarak jauh mereka. Penguasaan posisi ini menyebabkan orang Ara bergantung pada mereka, dan di awal abad ke-20 dikenang sebagai masa sulit di Ara. Ara juga terlibat secara independen dalam pembuatan perahu untuk penguasa Bone yang terletak jauh di utara. Namun ini tidak memberi mereka banyak uang, sebab Bone berada di luar rute perdagangan utama pada abad ke-20. (Gibson, 2009 ;12) Situasi yang agak berbeda terjadi di sisi lain ini, di Lemo-Lemo. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, para pembuat perahu Lemo-Lemo mengerjakan pesanan pemukim Makassar di sepanjang pantai Sulawesi Selatan, jauh hingga ke Gowa pada abad ke-19 daerah ini mempunyai akses uang yang jauh lebih besar ketimbang daerah Bugis di teluk Bone dan sebagai hasilnya para pembuat perahu Lemo-lemo menjadi jauh lebih kaya di banding orang Ara. Abad ke-19 dan awal-20 di kenang sebagai masa keemasan Lemo-lemo. (Jabal 2009).

### 3. Potret Sikap Masyarakat Konjo Terhadap Pembangunan

Pada suku-suku tertentu di negeri ini termasuk Suku Kajang (disebut juga sebagai masyarakat Konjo) atau yang lebih dikenal dengan Adat Ammatoa, adalah merupakan sebuah suku yang terdapat pada kebudayaan Sulawesi Selatan. Pemimpinnya disebut *Ammatowa*. Masyarakat Kajang bisa di jumpai pada Kabupaten Bulukumba dan lebih tepatnya di Kecamatan Kajang. Sebuah Suku Klasik yang masih kental akan adat istiadatnya yang sangat sakral. Suku ini merupakan salah satu suku yang tetap mempertahankan kearifan lokal sampai saat ini.

Dalam memegang tampuk kepemimpinan ini *Ammatowa* memilih lima orang pemuka adat untuk menjalankan roda pemerintahan. Kelima pemimpin tersebut diangkat oleh *Ammatowa* dengan suatu perjanjian, di saat alam tidak bersahabat seperti matinya tanaman dan hewan atau bencana alam, kelima pemuka adat harus rela melepas jabatannya. Suku ini berprinsip bahwa, daerah Kajang adalah daerah “kamase-masea” (melambungkan kesederhanaan atau kehidupan yang serba sangat sederhana).

Bahkan, salah satu contoh program pemerintah adalah memberikan akses penerangan (listrik) di daerah ini, di tolak oleh komunitas adat, sehingga sampai saat ini, daerah adat Kajang Ammatoa masih menggunakan penerangan lampu tembok yang dulunya terbuat dari buah jarak, tetapi sekarang sudah memakai minyak tanah. Jadi jangan mencari ada alat elektronik di daerah ini. Memasuki kawasan Adat, penduduk tidak boleh memakai alas kaki, termasuk tamu yang datang dari luar. Demikian juga komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, diperlukan skill komunikasi dari pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Jika tidak maka relatif sulit untuk menciptakan iklim yang dialogis antara pemerintah dan masyarakat.

Contoh lain berkaitan dengan pembangunan yaitu terkait dengan pembangunan pendidikan. Terkait ini pemerintah sudah menerapkan Program wajib belajar di Desa Tana Toa. Namun demikian, sebagian orang tua enggan memasukkan anaknya ke sekolah dengan macam-macam alasan. Kecuali dengan alasan untuk membantu di sawah atau ladang/kebun, mencari kayu bakar, mengembalakan/memelihara hewan. Alasan lainnya adalah adanya kekhawatiran muncul “perubahan sikap” anak-anaknya akibat “pengaruh” yang diperolehnya dari sekolah. Khusus bagi kalangan komunitas Ammatoa, “perubahan sikap” yang dapat terjadi itu dapat “menodai” ketaatan terhadap *pasang* dan menyebabkan masuknya “hal-hal yang tidak sebenarnya” seperti disinyalir dalam *pasang*: bulu tansing bulu, sa’ra tansing sa’ra (“kulit yang bukan kulit, suara yang bukan suara”).

Maka *pasang* itu memperingatkan kepada komunitas pengamalannya agar jangan menerima/memasukkan ke dalam wilayah mereka apa saja yang tidak pernah ada sebelumnya. Juga dapat diartikan sebagai pesan untuk tidak menerima sesuatu begitu saja tanpa pertimbangan yang matang (*ako kaitte-itte ri saha cinde tappanging, ri caula ta’rimba-rimba* = Jangan ikuti ular kekenyangan yang tergantung di pohon yang ditiup angin. Kalau dia sudah kenyang dia malas bekerja).

Gambaran kurangnya apresiasi masyarakat Desa Tana Toa khususnya bagi kalangan komunitas Ammatoa terhadap pendidikan bisa juga dilihat melalui sikap anak-anak yang termasuk usia sekolah terhadap “tuan guru” yang masuk ke daerah mereka. Mereka akan terbitir-birit atau menangis ketakutan.

## **B. Proses Komunikasi Pembangunan Berbasis Dialek Konjo**

Dialek Konjo merupakan sebuah dialek Makassar. Secara harfiah Konjo merujuk pada sebuah dialek bahasa Makassar yang dituturkan di desa-desa perbatasan kawasan berbahasa Makassar dan Bugis. “Konjo” berarti “di sini” dan dalam dialek Makassar lain yang menggunakan kata “anjo” untuk makna yang sama.

Sebagai sebuah bentuk proses komunikasi yang berbasis pada budaya lokal (*local wisdom*), dialek Konjo memiliki pesan-pesan bersifat khusus dan cenderung mengikat partisipannya. Pengikat atau perekat partisipan itu yaitu berupa norma-norma adat yang tegas dan tentunya memiliki sanksi tegas dan relatif berat bagi para pelanggarnya.

Pesan-pesan bersifat khusus dan cenderung mengikat partisipannya tadi, di lingkungan adat masyarakat Konjo, lazim dikenal dengan istilah *Pasang ri Kajang*. *Pasang ri Kajang* berarti “Pesan, wasiat, amanat; Nasihat atau wasiat; Amanat/amanah; Renungan /ramalan; dan Peringatan/mengingat”.

Merujuk pada kata “Konjo” yang berarti “di sini” sebelumnya, ini mengindikasikan bahwa secara umum *Pasang ri Kajang* itu menjadi sesuatu yang wajib diterapkan jika hendak berkomunikasi melalui *dialek konjo* di lingkungan masyarakat Konjo di Tana Toa Kajang. Secara khusus, *Pasang ri Kajang* juga menyiratkan bahwa pesan pesannya itu merupakan pesan yang bersifat lokal dan tidak boleh diubah-ubah.

Dalam pelaksanaan Dialek Konjo itu, juga diketahui bahwa penerapan *Pasang ri Kajang* yang isinya berupa doktrin atau materi-materi Pasang (pesan) itu langsung diawasi oleh *Amma Towa* sebagai pemimpin adat.

Hasil wawancara dengan unsur pemerintah dalam hal ini ibu Syamsiah staf dikantor kecamatan Kajang mengatakan bahwa pemerintah melakukan komunikasi dengan masyarakat kajang dengan menggunakan dialek konjo dengan mematuhi ketentuan yang diperlakukan dikawasan tanah adat desa Tanatoa diantaranya, pakaian yang digunakan komunikator adalah pakaian hitam, hitam putih. Tanpa menggunakan pakaian ini tidak diperkenankan untuk masuk diwilayah adat dan tidak diperkenankan sampai pada sore hari menjelang malam.

Selanjutnya bila terjadi proses komunikasi diantara partisipan yang dalam hal ini adalah pemerintah dan non pemerintah maka secara konektif dapat diterima sebagai bentuk *pengenalan dan pencerahan*. Tetapi secara apektif sebegini besar dapat dipahami atau dimengerti masyarakat maksud dan tujuan pemerintah dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat. Namun, untuk diimplementasikan hal itu yang menjadi sulit khususnya ditanah kawasan adat Ammatoa karena masyarakat tidak menerima hal-hal yang berkaitan dengan modernisasi dikawasan tanah adat. Singkatnya, hal-hal yang sifatnya di luar *Pasang ri Kajang* pasti di tolak masyarakat Konjo. Contoh dikawasan tanah adat yang bertentangan dengan *Pasang ri Kajang* itu misalnya, adanya listrik, adanya kendaraan bermotor, memakai alas kaki di dalam kawasan adat, dan lain sejenisnya yang bertentangan dengan *Pasang ri Kajang*.

Proses Komunikasi Pembangunan Berbasis Dialek Konjo menurut ibu kepala desa Tanatoa Sriwahyuni, juga menunjukkan bahwa bilamana pemerintah kabupaten atau provinsi melakukan kunjungan di kajang maka untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat adat dikawasan Tanatoa dibutuhkan penerjemah untuk melakukan komunikasi dan penerjemah tersebut disiapkan oleh kepala desa, karena memang yang diperbolehkan masuk dikawasan adat adalah tamu seizin dengan kepala desa.

Di samping itu, jika tamu tersebut dari luar kajang, maka pada waktu memasuki tanah Amma Towa dilarang menegur jika melihat atau mendengar sesuatu yang luar biasa, seperti bunyi giring-giring atau burung dan sebagainya. Juga dilarang meludah atau tertawa terbahak-bahak,terlebih-lebih kalau sampai memperolok-olok penduduk wilayah tersebut, sebab perlakuan tersebut dipandang sebagai penghinaan terhadap *Amma Towa*.

Namun begitu, sejauh ini menurut Bapak Kaharu salah seorang warga masyarakat yang juga dijadikan informan berdomisili didusun benteng kawasan Tana toa yang ditemui di bola

kambala, menyebutkan bahwa komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat tidak mengalami kesulitan sepanjang memenuhi ketentuan adat yang ada di kawasan Tanatoa. Hal ini ia rasakan bahwa komunikasi dari pejabat pemerintah yang dilakukan penyuluh pertanian sangat membantu masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Namun proses komunikasi yang dilakukan penyuluh tetap berada pada koridor ketentuan adat yang berlaku di Tanatoa, tetapi hal hal yang berkaitan dengan penggunaan teknologi pertanian tidak diterapkan oleh masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan *Pasang ri Kajang*.

Begitu juga halnya menurut informan lainnya seperti Syamsu Alam dari staf pengajar SD 351 kawasan adat Ammatoa. Dinyatakan bahwa untuk memudahkan guru berkomunikasi dengan muridnya maka guru mengajar dengan menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa lokal yang berdialek Konjo. Ini dilakukan karena kalau hanya mempergunakan bahasa Indonesia kadang anak murid *kurang mengerti* tetapi bilamana menggunakan bahasa Konjo murid pada mengerti. Karena itu maka guru-guru yang mengajar di sekolah di kawasan Ammatoa adalah mereka orang *di sini* dengan pertimbangan agar para guru tidak mengalami kesulitan.

Praktik proses Komunikasi Pembangunan Berbasis Dialek Konjo yang dilakukan partisipan komunikasi dari pihak pemerintah lainnya, yakni seperti penyuluh kesehatan, juga relatif tidak mengalami hambatan untuk menerapkannya. Namun, hambatan yang mereka alami umumnya sama dengan yang dialami partisipan lain, yaitu terkait dengan pesan komunikasi. Pesan komunikasi yang di luar dari substansi *Pasang ri Kajang* pasti ditolak. Penerimaan masyarakat cenderung hanya sebatas level kognitif belaka dan sulit diharapkan sampai pada level efek konatif. Hal ini diketahui dari pengungkapan pengalaman penyuluh kesehatan yang bertugas di puskesmas pembantu desa Tana Toa. Dikatakan bahwa "... hal yang menjadi tantangan terberat bagi penyuluh kesehatan karena masyarakat sulit menerima pengobatan medis bilamana masyarakat lagi ada yang sakit. Mereka masih menganggap bahwa dukun yang ada di Tana Toa lebih dipercaya untuk menyembuhkan dari pada tenaga medis. Persoalan ini sering dikomunikasikan dengan masyarakat mengenai betapa pentingnya pengobatan medis namun sebagian besar masyarakat tidak mengindahkan."

Relatif lancarnya penerapan praktik komunikasi pembangunan berbasis *dialek Konjo* di Tana Toa Kajang itu, berdasarkan fenomena yang terlihat ini terjadi karena muncul *liaison*<sup>1</sup> yang berasal dari masyarakat lokal. Dalam penelitian ini, pihak *liaison* ini tampaknya cenderung diperankan oleh Pak Hading. Menurut bapak yang memangku jabatan sebagai kepala dusun Benteng di kawasan adat ini, dirinya adalah bagian dari pemerintahan yang terkecil menjadi fasilitator informasi dari pemerintah di atas dengan aspirasi dari masyarakat dan secara rutin berkomunikasi dengan pak desa selaku atasan, begitu juga dengan pemangku adat Ammatoa. Oleh karena itu memang harus disesuaikan kepentingan pemerintah dengan kepentingan adat dan selama ini tidak menjadi masalah dalam melaksanakan komunikasi tersebut.

### C. Diskusi

Dialek Konjo merupakan bentuk budaya lokal yang eksis di kalangan masyarakat Kajang di Tana Toa Kajang Kabupaten Bulukumba. Sebagai bagian dari bentuk budaya lokal, dialek Konjo merupakan bentuk proses komunikasi lisan non media (berbahasa verbal dan verbal) yang keberlangsungannya bisa dalam *setting* interpersonal maupun kelompok.

Partisipan komunikasi berbasis dialek Konjo pada realitasnya bersifat lokal, yakni hanya dilakukan oleh komunitas suku Kajang di di Tana Toa Kajang Kabupaten Bulukumba.

Sebagai sebuah bentuk proses komunikasi yang berbasis pada budaya lokal (*local wisdom*), dialek Konjo memiliki pesan-pesan bersifat khusus dan cenderung mengikat partisipannya. Pengikat atau perekat partisipan itu yaitu berupa norma-norma adat yang tegas dan tentunya memiliki sanksi tegas dan relatif berat bagi para pelanggarnya. Pesan-pesan bersifat khusus dan cenderung mengikat partisipannya tadi, di lingkungan adat masyarakat Konjo, lazim dikenal dengan istilah *Pasang ri Kajang*. *Pasang ri Kajang* berarti "Pesan, wasiat, amanat; Nasihat atau wasiat; Amanat/amanah; Renungan /ramalan; dan Peringatan/mengingat".

Kekhususan penerapan proses komunikasi berbasis dialek Konjo tadi di satu sisi sebenarnya itu menjadi penghalang bagi kemajuan masyarakat Kajang itu sendiri. Menjadi

<sup>1</sup> Orang atau pihak yang memfasilitasi hubungan kerja yang akrab antara satu orang atau subyek/individu atau organisasi.

penghalang karena *Pasang ri Kajang* itu intinya berisi pesan anti modernisasi. Penganutnya sendiri yaitu suku Kajang memiliki prinsip hidup yang “kamase-masea”. Konsep ini berarti melambangkan kesederhanaan atau kehidupan yang serba sangat sederhana yang tentunya cenderung naturalistik.

Pada masyarakat yang demikian itu diidentifikasi oleh Mc CLelland (dalam Budiman 1995) sebagai masyarakat yang *need for achievement*-nya rendah secara relatif. Anutan terhadap nilai inilah yang menyebabkan masyarakat Konjo, sebagaimana ditemukan di lapangan, jadi anti modernisasi, misalnya seperti menolak pendidikan, pertanian modern, kesehatan modern atau listrik sekalipun. Keadaan ini sendiri, sebenarnya relatif mirip dengan yang eksis di lingkungan masyarakat suku Badui Dalam di Provinsi Banten. Di komunitas ini, melalui “Puun” yang berposisi sama dengan *Ammatoa* sebagai pemangku adat di kalangan masyarakat suku Kajang, juga menerapkan prinsip hidup dengan slogan “Panjang galah tak dapat dipotong dan pendek galah tak dapat disambung’. Inti dari slogan ini yaitu, *orisinilitas*, seadanya dan tidak boleh dipengaruhi. Jadi, dengan prinsip tersebut, tampaknya relatif sama dengan prinsip hidup masyarakat Konjo. Hanya saja berbeda dalam verbal-nya. Suku Kajang berprinsip bahwa, daerah Kajang adalah daerah “kamase-masea” (berarti sesuatu yang melambangkan kesederhanaan atau kehidupan yang serba sangat sederhana).

Baik prinsip “kamase-masea” maupun slogan “Panjang galah tak dapat dipotong dan pendek galah tak dapat disambung’, dalam perspektif Mc CLelland , tampak keduanya sama-sama mencerminkan masyarakat yang *need for achievement*-nya rendah. Di sisi lain, ini mungkin menjadi penyebab kenapa masyarakat Konjo, sebagai mana ditemukan dalam penelitian ini, efek komunikasi yang berhasil dilakukan oleh agen-agen pembangunan melalui proses komunikasi pendukung pembangunan (DSC) berbasis dialek konjo, hanya sebatas pada level kognitif saja yang dalam realitasnya wujudnya berupa pengakuan suku Konjo sebagai “pengenalan atau pencerahan”. Sementara yang sifatnya hingga berlevel konatif, secara relatif hampir tidak mungkin terjadi karena sifatnya kontradiktif dengan *Pasang ri Kajang* yang nota bene sama dengan prinsip hidup “kamase-masea”.

Pada hakikatnya, temuan penelitian ini telah mencerminkan keberhasilan keberlangsungan sebuah proses komunikasi yang berbasiskan budaya lokal, yang dalam hal ini berbasiskan Dialek Konjo. Keberhasilan ini sendiri merefleksikan keberhasilan mengadopsi model komunikasi pembangunan yang diajukan oleh Jayaweera. Model Komunikasi Pembangunannya sendiri disebut model Komunikasi Penunjang pembangunan (*Development Support Communication-DSC*).

Model DSC sendiri merupakan pendekatan mikro yang berusaha menyelesaikan permasalahan masyarakat pada tingkatan komunitas sesuai dengan aspirasi komunitasnya. Refleksi keberhasilan para agen pembangunan sendiri dalam mengadopsi Model DSC tadi, dalam riset ini, itu diantaranya dicerminkan melalui keberhasilan mengadopsi dialek Konjo itu sendiri dalam proses komunikasi antara aparat pemerintah dan komunitas atau masyarakat Konjo. Namun demikian, ketidakberhasilan dalam mencapai efek konatif dalam proses Komunikasi Pembangunan Berbasis Dialek Konjo, itu kiranya masih mencerminkan sebuah kegagalan.

Kegagalan ini tentunya mencerminkan kegagalan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat suku Konjo. Kegagalan mana, tentunya mencerminkan keterampilan para agen pembangunan dalam menerapkan DSC. Dalam kaitan ini, menurut Mc CLelland (dalam Budiman 1995), para agen pembangunan itu harus bisa menyebarkan virus *need for achievement*. Sehingga dengan tumbuhnya hasrat berprestasi tersebut akan bisa menjadi sumber motivasi untuk menggerakkan pembangunan di kalangan komunitas suku Konjo Kajang. Untuk kasus komunitas suku Konjo ini, salah satu pintu masuk yang pas untuk bertindak ke arah itu, yaitu dengan cara memanfaatkan *liaison* yang eksis tentunya pada Masyarakat di Tana Toa Kajang Kabupaten Bulukumba.

## PENUTUP

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya pada bagian awal tulisan ini, penelitian ini ingin mengetahui fenomena proses komunikasi yang terjadi antara Pemerintah dan Masyarakat yang *setting*-nya berbasiskan pada *dialek konjo* sebagai bentuk representasi dari budaya lokal. Dengan fokus persoalan tersebut, penelitian ini ingin mendapatkan gambaran proses komunikasi menyangkut unsur *what, how and why* melalui *dialek konjo*. Berdasarkan temuan penelitian dan dari diskusi yang dilakukakan, dapat dikemukakan beberapa hal sbb.:

1) *Dialek Konjo* merupakan sebuah dialek Makassar. Secara harfiah *Konjo* merujuk pada sebuah dialek bahasa Makassar yang dituturkan di desa-desa perbatasan kawasan berbahasa Makassar dan Bugis. “*Konjo*” berarti “di sini” dan dalam dialek Makassar lain yang menggunakan kata “*anjo*” untuk makna yang sama. Sebagai sebuah bentuk proses komunikasi yang berbasis pada budaya lokal (*local wisdom*), dialeg *Konjo* memiliki pesan-pesan bersifat khusus dan cenderung mengikat partisipannya. Pengikat atau perekat partisipan itu yaitu berupa norma-norma adat yang tegas dan tentunya memiliki sanksi tegas dan relatif berat bagi para pelanggarnya. Pesan-pesan bersifat khusus dan cenderung mengikat partisipannya tadi, di lingkungan adat masyarakat *Konjo*, lazim dikenal dengan istilah *Pasang ri Kajang*. *Pasang ri Kajang* berarti “Pesan, wasiat, amanat; Nasihat atau wasiat; Amanat/amanah; Renungan /ramalan; dan Peringatan/mengingat”.

2) Sebagai bagian dari bentuk budaya lokal, *dialek Konjo* merupakan bentuk proses komunikasi lisan non media (berbahasa verbal dan verbal) yang keberlangsungannya bisa dalam *setting* interpersonal maupun kelompok. Partisipan komunikasi berbasis *dialek Konjo* pada realitasnya bersifat lokal (khusus), yakni hanya dilakukan oleh komunitas suku *Kajang* di di Tana Toa *Kajang* Kabupaten Bulukumba saja.

3) Kekhususan penerapan proses komunikasi berbasis dialek *Konjo* tadi di satu sisi sebenarnya itu menjadi *penghalang* bagi kemajuan masyarakat *Kajang* itu sendiri. Menjadi *penghalang* karena *Pasang ri Kajang* itu intinya berisi pesan anti modernisasi. Penganutnya sendiri yaitu suku *Kajang* memiliki prinsip hidup yang “*kamase-masea*”. Konsep ini berarti melambangkan kesederhaanaan atau kehidupan yang serba sangat sederhana yang tentunya cenderung naturalistik. Prinsip hidup yang demikian sendiri, kurang lebih sama dengan yang dianut oleh masyarakat *Badui Dalam* di Provinsi *Banten* yang dikenal melalui prinsip “*Panjang galah tak dapat dipotong dan pendek galah tak dapat disambung*”. Baik prinsip “*kamase-masea*” maupun slogan “*Panjang galah tak dapat dipotong dan pendek galah tak dapat disambung*”, dalam perspektif *Mc Clelland*, keduanya sama-sama mencerminkan masyarakat yang *need for achievement*-nya rendah.

4) Pada masyarakat yang *need for achievement*-nya rendah, termasuk seperti di *Tana Toa Konjo Kajang*, efek proses komunikasi penunjang pembangunan yang mencapai hingga konatif, sulit dicapai karena masyarakat menganggap pesan-pesan pembangunan yang disampaikan para agen pembangunan itu sifatnya hanya sebagai “*pencerahan*” saja sehubungan pada intinya pesan-pesan dimaksud kontradiktif dengan makna pesan dalam *Pasang ri Kajang* yang mereka junjung tinggi.

5) Para agen pembangunan di *Tana Toa Kajang* Kabupaten *Bulukumba*, berdasarkan ketidakberhasilannya mencapai efek konatif melalui proses komunikasi penunjang pembangunan berbasis dialek *Konjo* di kalangan masyarakat suku *Kajang*, kiranya membuktikan bahwa para agen pembangunan itu belum pernah atau tidak berhasil menyebarkan virus *need for achievement*.. Padahal keberhasilan penyebaran virus *need for achievement* itu menjadi prakondisi yang sangat menunjang keberhasilan mencapai efek konatif/behavioral dalam proses komunikasi penunjang pembangunan, termasuk tentunya seperti yang dilakukan di *Tana Toa Kajang* Kabupaten *Bulukumba* ini.

6) Untuk kasus ini, maka salah satu pintu masuk yang pas untuk melakukan penyebaran virus *need for achievement* itu, kiranya dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan *liaison* yang eksis pada Masyarakat di *Tana Toa Kajang* Kabupaten *Bulukumba*.

## Daftar Pustaka

- Budiman, Arief. (1995). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta : Gramedia.
- Herawati. (2010). Pemertahanan Bahasa *Konjo* di Tengah Desakan Bahasa *Bugis* Di Buffer *Stard*. Balai Bahasa Prov. *Sulteng*.
- Jabal, Amran. (2009). *Mengenal Konjo Pesisir*. Sumber : <http://andankku.blogspot.com/2009/12/>, diakses Februari 4, 2014.
- Jayaweera, Neville. (1987). *Rethinking Development Communication: a holistic view dalam Neville Jayaweera and Sarath Amunugama* (ed), *Rethinking*.
- Mas, Alim Katu. (2005). *Manusia Kajang*. Makassar: Refleksi Perum Swadaya Mas.
- Rusadi, Udi. (2014). Makna dan Model Komunikasi Pembangunan, dalam *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* Vol 18 (1) 2014.
- Usop. (1985). *Konjo dalam Perspektif Sejarah*.
- Yin, Robert K. (1997). *Studi Kasus (Desain Dan Metode)*. Jakarta : Raja Grafindo.